

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh BPK tahun 2012. Berdasarkan metode purposive sampling yang telah ditetapkan pada Bab III, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 148 yang memenuhi kriteria. Adapun Prosedur Pemilihan sampel tampak pada tabel 4.1.

TABEL 4.1.
PROSEDUR PEMILIHAN SAMPEL.

No	Keterangan	Tahun 2012
1.	LKPD Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia periode tahun 2012 yang telah diaudit oleh BPK	481
2.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tidak ditetapkan	(333)
2.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dan diambil sesuai kriteria.	148
3.	Jumlah Sampel Penelitian	148

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2014

Berdasarkan tabel 4.1. tersebut diperoleh sampel sebanyak 481 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh BPK. Penelitian ini menggunakan periode selama 1 tahun dan didapat 148 sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan meliputi seluruh variabel penelitian, yaitu kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita.

B. Statistik Deskriptif

TABEL 4.2.
STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL PENELITIAN

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TK_LKPD	148	12.00	21.00	17.00	1.74
KD (Dalam Jutaan Rupiah)	148	0.48	31.59	3.29	3.36
JP (Dalam Jutaan)	148	0.01	2.79	0.49	0.54
PK (Dalam Jutaan Rupiah)	148	2.27	443.67	30.85	49.20
Valid N (listwise)	148				

Sumber: Hasil Olah Data Statistik Deskriptif.

Keterangan:

TK_LKPD : Tingkat Pengungkapan wajib LKPD

KD : Kekayaan Daerah

JP : Jumlah Penduduk

PK : Pendapatan Per Kapita

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa penelitian ini sebanyak 148 sampel. Hasil statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan wajib dalam neraca pemerintah daerah adalah 17,00 atau sebesar 50%. Rata-rata tingkat pengungkapan wajib LKPD sebesar 17,00, nilai minimum sebesar 12,00, nilai maksimum sebesar 21,00, dan standar deviasi sebesar 1,74. Rata-rata Kekayaan daerah sebesar 3,29, nilai minimum sebesar 0,48, nilai maksimum sebesar 31,59, dan standar deviasi sebesar 3,36. Rata-rata Jumlah penduduk sebesar 0,49, nilai minimum sebesar 0,01, nilai maksimum sebesar 2,79, dan standar deviasi sebesar 0,54. Rata-rata Pendapatan per kapita sebesar 30,85, nilai minimum sebesar 2,27, nilai maksimum sebesar 443,67, dan standar deviasi sebesar 49,20.

C. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang akan diuji dalam model persamaan penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

TABEL 4.3.
HASIL UJI NORMALITAS

	Z	p-value	Keterangan
One Sample KS	0,504	0,962	Data berdistribusi normal

Sumber: Lampiran Hasil Olah Data Uji Normalitas.

Pada tabel 4.3 terlihat besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,504 dengan signifikansi 0,962 yang lebih besar dari *alpha* (0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

TABEL 4.4.
HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

Variabel Bebas	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
KD	0,71	1,39	Tidak ada multikolinearitas
JP	0,83	1,20	Tidak ada multikolinearitas
PK	0,83	1,20	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: Lampiran Hasil Olah Data Uji VIF.

Keterangan:

KD : Kekayaan Daerah
 JP : Jumlah Penduduk
 PK : Pendapatan Per Kapita

Berdasarkan tabel 4.4. hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF, nilai VIF < 10 , artinya bahwa semua variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas, sehingga tidak membiaskan interpretasi hasil analisis regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

TABEL 4.5.
HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Variabel Terikat	Variabel Bebas	Sig	Keterangan
ABS	KD	0,472	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	JP	0,082	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	PK	0,866	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS

Sumber: Lampiran Hasil Olah Uji Heteroskedastisitas.

Keterangan:

KD : Kekayaan Daerah

JP : Jumlah Penduduk

PK : Pendapatan Per Kapita

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *Glejser* terlihat bahwa nilai probabilitas $> 0,05$. Hal ini berarti model yang diestimasi bebas dari heteroskedastisitas.

D. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

1. Uji Nilai F

TABEL 4.6.
Hasil Uji Nilai F

Sig F	Keterangan
0,007	Berpengaruh secara simultan (bersama)

Sumber: Lampiran Hasil Olah Data Uji F.

Berdasarkan pengujian statistik F dapat diketahui bahwa nilai signifikan F adalah 0,007 yang lebih kecil dari *alpha* 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu kekayaan daerah, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

2. Uji Nilai *t*

TABEL 4.7.
HASIL REGRESI LINIER BERGANDA

Variabel	B	Sig.	Keterangan
(Constant)	16,900	,000	
KD	-0,081	0,102	Tidak signifikan
JP	0,614	0,031	Signifikan
PK	0,002	0,529	Tidak signifikan

Sumber: Hasil Olah Data Regresi Linier Berganda.

Keterangan :
 KD : Kekayaan Daerah
 JP : Jumlah Penduduk
 PK : Pendapatan Perkapita

Persamaan model regresi yang diajukan sebagai berikut :

$$TK_LKPD = 16,900 - 0,081KD + 0,614JP + 0,002PK + e$$

Pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi dilakukan dengan menguji persamaan regresi secara individual terhadap masing-masing variabel independen. Hasil pengujian regresi secara individual diperoleh sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Berdasarkan hasil olah data, variabel kekayaan daerah (KD) memiliki koefisien negatif sebesar -0,081 dengan *p-value* (sig) 0,102 > 0,05, maka hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini tidak terbukti/ditolak. Hal ini berarti kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

b. Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Berdasarkan hasil olah data, variabel jumlah penduduk (JP) memiliki koefisien positif sebesar 0,614 dengan *p-value* (sig) 0,031 < 0,05, maka hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini terbukti/diterima. Hal ini berarti jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3)

Berdasarkan hasil olah data, variabel pendapatan per kapita (PK) memiliki koefisien positif sebesar 0,002 dengan *p-value* (sig) 0,529 > 0,05, maka hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini tidak terbukti/ditolak. Hal ini berarti pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

TABEL 4.8.
RINGKASAN HASIL HIPOTESIS PENELITIAN

	Hipotesis	Hasil
H ₁	Kekayaan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD	Ditolak
H ₂	Jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD	Diterima
H ₃	Pendapatan per kapita berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD	Ditolak

3. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

TABEL 4.9.
UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	,282	,080	,061	1,688

Sumber: Lampiran Hasil Olah Koefisien Determinasi, 2014.

Berdasarkan tabel koefisien determinasi di atas besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,061. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen (kekayaan daerah, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita) dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen (tingkat pengungkapan wajib LKPD) sebesar 6,1% sedangkan sisanya 93,9% (100% - 6,1%) dijelaskan oleh variabel lain diluar modal regresi yang dianalisis.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Tingkat pengungkapan wajib LKPD

Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa kekayaan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Hasil ini serupa dengan penelitian Sumarjo (2010) dan Marfiana (2011) yang menghubungkan pengaruh PAD terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Syafitri (2012), Liestiani (2008), dan Laswad *et.al.* (2005).

Variabel kekayaan daerah yang tidak signifikan sebagai akibat masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat atas pajak dan retribusi yang dibayarkan. Masyarakat cenderung hanya melaksanakan kewajiban tanpa menuntut hak. Peran *steward* dan prinsipal antara pemerintah daerah dengan masyarakat kurang dapat terlaksana dengan baik, akibatnya peran kekayaan daerah kurang bisa memotivasi dan menyadarkan pemerintah dalam melakukan pengungkapan wajib sesuai SAP dengan lebih baik.

2. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat pengungkapan wajib LKPD

Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan arah positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liestiani (2008), Hilmi dan Martani (2012) yang

menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan.

Jumlah penduduk merupakan proksi dari kompleksitas pemerintah daerah berdasarkan jumlah penduduk suatu daerah yang menginginkan informasi pengungkapan wajib laporan keuangan. Semakin kompleks pemerintahan maka semakin besar pengungkapan wajib yang harus mereka lakukan. Tingginya dorongan untuk memperoleh informasi pengungkapan wajib laporan keuangan berbanding lurus dengan jumlah penduduk di daerah tersebut.

3. Pengaruh Pendapatan Per kapita Terhadap Tingkat pengungkapan wajib LKPD

Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Hal ini dikarenakan pendapatan per kapita merupakan tolak ukur kemakmuran suatu daerah, mekanisme ekonomi yang semakin meningkat membuat masyarakat kurang peduli terhadap pengungkapan dan cenderung lebih memikirkan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ekonomi untuk meningkatkan pendapatan.

Pendapatan per kapita harusnya menjadi salah satu faktor yang bisa digunakan dalam hal pengungkapan pemerintah, akan tetapi pendapatan yang semakin tinggi malah membuat tingkat pengungkapan menjadi rendah.